



Sabtu, 20 Februari 2016 06:00

Wakil Rakyat Desak BPK Transparan di Malteng



POLITISI Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Djailani Tomagola, sempat berang cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Maluku, dalam melakukan audit, atas pelbagai masalah di kabupaten “tertua” di Maluku ini.

Dia menilai, BPK tidak transparan dalam melakukan pelbagai audit sejumlah masalah di kabupaten berjuluk: “Pamahanunusa” ini. Saat dua anggota BPK, tengah melakukan pemeriksaan mobil dinas di rumah wakil rakyat setempat, keduanya langsung disemprot Tomagola.

Wakil Rakyat ini rupanya tidak puas mencecar tim audit BPK ini di gedung rakyat. Begitu keduanya asik memeriksa mobil, tanpa tedeng aling-aling dia berujar, “ Saya minta BPK ini transparan melakukan pemeriksaan di Malteng. Sejumlah kasus-kasus yang mengemuka kerap ditutup-tutupi,” semprot Tomagola kepada kedua Tim BPK itu.

Selanjutnya, dia menegaskan, banyak masalah penyimpangan di Kabupaten Malteng ini, terkesan tidak ada transparansi BPK dalam melakukan audit. “Ini kan sengaja ditutup-tutupi. Padahal, seharusnya hasil audit harus diekspos agar ada transparansi atas kerja-kerja audit BPK,” tukasnya.

Salah satu kasus yang dibuka dihadapan kedua anggota BPK RI, itu adalah: Proyek pengadaan baju dinas anggota DPRD Malteng, yang digarap kontraktor bernama: Zeth Tuankota. “Kami dilantik September tahun 2014, tapi realisasi proyek itu baru Desember 2015. Dengan begitu jelas proyek terlambat satu tahun. Kenapa ini tidak diungkap,” semprotnya lagi

Selain itu, beber dia, kasus lima PNS di Kecamatan Telutih, di tahun 2013 dan 2014, yang gajinya dibayarkan di Kecamatan Tehoru, tapi anggaran tiap tahun Rp 1,5 miliar. Selanjutnya, masalah 28 PNS di Kecamatan Leihitu, yang besar anggarannya Rp 17,6 miliar. Apakah ini, bisa diungkap BPK,” tanya dia geram.

Kedua anggota BPK ini, tak banyak bicara saat “diserang” politisi Demokrat itu. Kepada wartawan salah dari anggota BPK yang bernama Kholis mengaku, tak akan menanggapi sang wakil rakyat itu. “Kita akan tindaklanjuti setiap informasi. Dan, kita akan melihat lagi setiap dokumen. Apakah dokumen itu, mendukung keterangan yang disampaikan itu,” kata dia.

Menurutnya, bila nanti keterangan itu akan diolah sesuai data dan informasi dengan mengkonfirmasi pihak ketiga, selanjutnya baru diambil kesimpulan. “Kita akan olah semua informasi ini sesuai keterangan. Bila memang



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

terbukti sebagaimana keterangan itu bahwa ada penyimpangan maka kita akan limpahkan ke BPH,” tutupnya.
(MG5)